

# Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi

Oleh: Salsabila Az Zahraamadhani  
Dosen Pembimbing: Lailul Mursyidah  
Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Oktober 2025

# Pendahuluan

- Pelayanan publik menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan.
- Digitalisasi mendorong layanan publik yang responsif, efisien, transparan, dan inklusif.
- KUA berperan penting dalam pencatatan pernikahan, sehingga memerlukan sistem yang akuntabel.
- Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) hadir untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pelayanan.

# Data Empiris / Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- KUA Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa, dengan  $\pm 1.100$  pendaftar pernikahan pada tahun 2024.
- Terdapat 5 petugas KUA yang menangani sistem SIMKAH.
- Rata-rata pendaftaran dilakukan 30 hari sebelum akad, dengan waktu verifikasi 2–3 minggu.
- Permasalahan: keterbatasan SDM, gangguan server, dan kesalahan input data yang lambat diperbaiki.

# Penelitian Terdahulu

1. Yunita & Prasetyo (2022): SIMKAH mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi data.
2. Hidayat (2023): Pentingnya integrasi SIMKAH dengan data kependudukan nasional.
3. Arfah (2022): Optimalisasi SIMKAH di tingkat kecamatan masih terkendala pemahaman pengguna. Penelitian ini mengisi kesenjangan terkait efektivitas dan hambatan implementasi SIMKAH di tingkat KUA.

# Rumusan Masalah dan Gap Penelitian

- Rumusan Masalah:
  1. Bagaimana efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Candi?
  2. Faktor apa saja yang menghambat efektivitas SIMKAH?
- Gap Penelitian:
  - Masih sedikit penelitian yang mengevaluasi SIMKAH di tingkat kecamatan.
  - Sebagian penelitian hanya menyoroti teknis sistem, belum pada aspek efektivitas dan akuntabilitas layanan publik.

# Teori Penelitian

Teori yang digunakan: New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2003)

Indikator Efektivitas Pelayanan Publik:

1. Responsivitas, sejauh mana layanan menjawab kebutuhan masyarakat.
2. Transparansi, keterbukaan informasi dan akses publik.
3. Akuntabilitas, pertanggungjawaban terhadap hasil layanan publik.

# Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif.

Lokasi: KUA Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data:

- Wawancara mendalam dengan petugas, calon pengantin, dan tokoh masyarakat.
- Observasi langsung proses pendaftaran.
- Dokumentasi dan studi pustaka.

Analisis Data: Model Miles & Huberman (Reduksi, Penyajian, Penarikan Kesimpulan).

# Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan indikator

Denhardt & Denhardt (2003):

## 1. Responsivitas

- Waktu layanan meningkat signifikan: dari 90 hari–4 bulan menjadi  $\pm 5$ –10 menit
- Akses layanan digital (via HP) + integrasi Dukcapil mempercepat verifikasi
- Kendala: literasi digital rendah & jaringan belum merata

## 2. Transparansi

Informasi biaya & prosedur terbuka:

- Di KUA gratis, luar KUA Rp600.000
- Status layanan dapat dipantau melalui akun pribadi

Keterbatasan: belum ada dashboard publik & fitur revisi online

# Hasil dan Pembahasan

## 3. Akuntabilitas

- Sistem mencatat seluruh proses (log digital) → mudah diaudit
- Akuntabilitas internal kuat, namun publik masih terbatas

### Kendala:

- SDM hanya 5 petugas untuk  $\pm 1.100$  pendaftar/tahun
- Tidak ada dashboard kinerja & sistem backup saat error

# Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan teori Denhardt & Denhardt (2003), penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Candi terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan, terutama pada aspek responsivitas melalui percepatan waktu layanan, transparansi melalui keterbukaan biaya dan prosedur, serta akuntabilitas melalui pencatatan digital yang dapat diaudit. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya fitur interaktif dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar pelayanan menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan optimal.

# Daftar Pustaka

- [1] P. Kualitas, P. Publik, T. Kepuasan, M. Di, K. Salahutu, and K. Maluku, "Jurnal administrasi terapan vol 2, no. 1, maret 2023," vol. 2, no. 1, pp. 232–239, 2023.
- [2] V. N. Juni, A. Diastuti, and R. Ayyustia, "Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di Kelurahan Sunter Agung Universitas Terbuka Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik melalui Inovasi Digital di Kelurahan Sunter Agung tersebut . Digitalisasi layanan publik diyakini mampu memberikan percepatan proses," 2025.
- [3] KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun, "Berita Negara," Peratur. Menteri Kesehat. Republik Indones. Nomor 4 Tahun 2018, vol. 151, no. 2, pp. 10–17, 2018.
- [4] W. A. Handayani and G. Djajaputra, "Legal Consequences of an Unregistered Marriage Agreement from a Marriage Agreement Deed Canceled by The Supreme Court ( Case Study of Marriage in The Decision of The Supreme Court Number 598 / PK / PDT / 2016 )," vol. 4, no. 4, pp. 829–834, 2024.
- [5] I. Dan, H. Positif, S. Kasus, and T. Pemahaman, "URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)," pp. 215–230.
- [6] I. Santosa and S. Lestari, "Problematika Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Praktik Pernikahan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Blimbing," vol. 8, pp. 23–38, 2025.
- [7] Y. S. Isma, D. Kardiati, and S. K. Fadhillah, "Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik," vol. 6, no. 3, 2025.
- [8] T. Hildayana, M. Azizi, J. A. Lubis, and A. Nawawi, "Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai : Studi Kualitatif," vol. 5, pp. 696–704, 2025.

# Daftar Pustaka

- [9] J. L. Adisucipto, K. Depok, K. Sleman, and D. I. Yogyakarta, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani," vol. 2, no. 1, pp. 109–124, 2023.
- [10] A. Regita, D. Fitriana, and U. Airlangga, "MAP ( Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik ) Vol . 7 No . 3 ISSN 2615-2142 ANALISIS INOVASI ROTI 7 LAPIS ( RESPONSE TIME 7 MENIT LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN GRATIS ) DI KOTA SURABAYA DALAM The " Roti 7 Lapis " innovation by Surabaya Fire and Rescue De," vol. 7, no. 3, 2022.
- [11] A. Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik," Otoritas J. Ilmu Pemerintah., vol. 1, no. 2, pp. 81–90, 2011, doi: 10.26618/ojip.v1i2.22.
- [12] H. T. gedeona, "Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholders," J. Ilmu Adm., vol. VIII, no. 3, pp. 300–3011, 2011.
- [13] N. Z. Laily and S. Yuliani, "Efektivitas Mal Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-EI ) di Kabupaten Magetan," J. Mhs. Wacana Publik, vol. 3, pp. 370–386, 2023.
- [14] S. F. Meyriyani, N. Sujana, and P. Utami, "Penerapan Prinsip New Public Service (NPS) Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kota Tangerang," J. Ilm. Wahana Pendidik., vol. 10, no. 2, pp. 819–828, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10499283>.
- [15] V. I. Pertiwi, "RESPONSIVITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM PASCA AKAD NIKAH DI KOTA TASIKMALAYA," vol. 8, no. 1, pp. 521–531, 2025.
- [16] K. Gowa, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online ( Simkah ) dalam Administrasi Pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa," vol. 5, no. 12, pp. 5470–5480, 2024.
- [17] A. Arfah, "Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu," J. Kewarganegaraan, vol. 6, no. 3, pp. 6153–6166, 2022.
- [18] A. Tongkonoo and A. Ishak, "Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web," J. Huk. Islam, vol. 1, no. 2, pp. 12–20, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/182>

# Daftar Pustaka

- [19] J. Ilmiah and W. Pendidikan, "1 , 2 , 3," vol. 10, no. 4, pp. 744–754, 2024.
- [20] A. Dwiyan, M. Z. Al Habsy, E. Rachman, and T. Thalib, "Implementation of the Marriage Management Information System ( SIMKAH ) in the Religious Affairs Office , Central City District , Gorontalo City," vol. 10, no. 4, pp. 5–10, 2024, doi: 10.58258/jime.v.
- [21] M. A. Thalib, "Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya," vol. 5, no. 1, pp. 23–33, 2022.
- [22] V. Gracenia, A. Publik, F. Ilmu, I. Politik, and U. M. Bengkulu, "JPSI ( Journal of Public Sector Innovations ) Analisis Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama," vol. 7, no. 1, pp. 52–60, 2022.
- [23] N. B. Rahmawati, M. Baharudin, and Z. Tjenreng, "Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoretis," vol. 5, no. 1, pp. 313–323, 2025.
- [24] N. Kantue, "Efektivitas Pengelolaan SIMKAH dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data di KUA Kota Bitung," *Al-Mujtahid J. Islam. Fam. Law*, vol. 2, no. 1, p. 73, 2022, doi: 10.30984/ajifl.v2i1.1936.
- [25] P. Hidayat, B. Sutikno, and A. Kantor, "Akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada kantor kecamatan gading cempaka kota bengkulu," vol. 11, no. 1, pp. 45–56, 2025.
- [26] F. Ilmu, S. Dan, I. Pemerintahan, U. Islam, and N. A. Banda, "Aplikasi simkah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat pada kantor urusan agama kecamatan sukakarya kota sabang," 2021.